

Modal Sosial Nelayan Pengguna Cantrang di Pantai Pelabuhan Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Jawa Tengah

*Social capital of fishermen using cantrang at the Fishing Port Beach
in Batang Regency, Central Java*

Marini Kristina Situmeang

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: marini.kristina@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to explore the forms of social capital that take place in fishing communities that use *cantrang* in the Capture Fisheries Area of Batang Regency. The method used is qualitative with an exploratory descriptive approach. Data collection was carried out by observation, interviews, focus group discussion and literature studies. The results showed that in the aspect of socioeconomic networks, social networks of actors were formed consisting of subsistence fishermen, native fishermen, commercial fishermen, fishing boat crews, Fish Processing Entrepreneurs, Fish Contractors, small-scale fish sellers, shipyards, fisheries shahbandars and the Fisheries Marine Service. In the aspect of bridging social capital, collaboration takes place among fishermen who use *cantrang*, fish entrepreneurs at TPI, food processing business actors, fellow crew members, shipyards, Ship Motorists, and fish sellers in markets and small basket fish sellers. In the aspect of linking social capital, social networks form participation during FGD, Advocacy, and Socialization related to capture fisheries activities together with the Regent, the Marine Fisheries Service, and HNSI.

Keywords: *Social capital, Fisherman, Cantrang*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi modal sosial yang berlangsung pada masyarakat nelayan pengguna cantrang di Wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, focus group discussion (FGD) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek jaringan sosial ekonomi terbentuk jaringan sosial aktor yang terdiri dari nelayan subsisten, nelayan asli, nelayan komersil/ Juragan kapal, nelayan ABK, Pengusaha Pengolahan Ikan, Pemborong ikan, penjual ikan bakul-bakul kecil, galangan kapal, syahbandar perikanan dan Dinas Kelautan Perikanan. Pada aspek *bridging social capital*, kolaborasi berlangsung di antara nelayan pengguna cantrang, pengusaha ikan di TPI, Pelaku usaha pengolahan makanan, sesama ABK, Galangan kapal beserta Motoris Kapal, penjual ikan di pasar dan penjual ikan bakul-bakul kecil. Pada aspek *linking social capital*, jaringan sosial membentuk partisipasi saat FGD, Advokasi, serta Sosialisasi yang berkenaan dengan aktivitas perikanan bersama bupati, Dinas Kelautan dan HNSI.

Kata Kunci: *Modal sosial, Nelayan, Cantrang*

A. Pendahuluan

Kebijakan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan dengan jenis cantrang di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Permen KP No. 2 Tahun 2015 masih menjadi polemik yang cukup serius, terutama bagi nelayan yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Kelompok yang paling terdampak yaitu nelayan yang menggunakan cantrang pada aktivitas penangkapan ikan setiap harinya. Hal ini sebagaimana (Ermawati and Zuliyati 2015) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kerugian yang paling banyak dirasakan sejak tahun 2015 seperti turunnya nilai produksi perikanan, banyaknya nelayan ABK (Anak Buah Kapal) yang menganggur, munculnya aksi kejahatan, serta terdampak pula pada kesejahteraan ekonomi masyarakat lainnya yang bekerja sebagai pelaku usaha perikanan dan bergantung pada hasil tangkapan ikan nelayan pengguna cantrang.

Terkait persoalan di atas, salah satu bentuk penolakan keras terhadap kebijakan larangan penggunaan cantrang berlangsung pada kelompok nelayan di Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana yang tertera pada Radar Pekalongan pada tanggal 20 Januari 2015 dimana ratusan nelayan dari Kabupaten Batang menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang dan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang untuk menolak munculnya Peraturan Menteri tersebut karena dinilai akan sangat memberatkan nelayan (<https://www.kompas.id> 2022). Beberapa upaya telah dilakukan nelayan di Batang seperti berangkat ke Jakarta untuk menuntut pencabutan Permen KP No 2 Tahun 2015, melakukan aksi blokade jalan di sekitar kantor Kementerian dan Dinas Kelautan Jawa Tengah, serta aksi pembakaran alat tangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan bagi nelayan (Situmeang 2018).

Aksi protes lainnya juga dilakukan oleh nelayan di halaman kantor Bupati Batang dengan cara melakukan *long march* di Jalan Pantura alun-alun Kota

Batang dan berakhir dengan bentrokan antara nelayan dan aparat kepolisian setempat. Aksi protes yang berakhir dengan bentrokan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan dan ketidakpenerimaan nelayan terhadap pemerintah yang menyatakan alat tangkap ikan cantrang sebagai salah satu penyebab rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan-ikan kecil, dan biota laut lainnya (Arumsari, Paradita, and Wijayanti 2020).

Selain sebagai upaya mempertahankan cantrang sebagai alat tangkap ikan yang aktif dan produktif, peneliti menilai bentuk protes yang dilakukan nelayan cantrang di Batang merepresentasikan adanya hubungan yang bersifat kuat dan bernilai di dalam aktivitas sosial ekonomi nelayan dimana cantrang sebagai alat produksinya. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan masyarakat nelayan di Batang secara kolektif melakukan aksi protes terhadap kebijakan Permen KP No. 2 Tahun 2015 dan menolak untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan lainnya sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana (Situmeang 2018) dalam penelitiannya juga menemukan adanya konstruksi nilai budaya yang bersifat kuat dan melekat atas penggunaan cantrang sebagai *mode of production* dan telah diwariskan secara turun-temurun pada aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Di dalam perspektif sosiologi, nilai yang dianggap berharga dan terinternalisasi secara kuat tidak lepas dari adanya peranan modal sosial dimana kepercayaan di antara sesama anggota kelompok sebagai sarana penguatnya (Fukuyama 1995). Sedangkan pada tingkat kolektivitas, modal sosial juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan kerja sama aktor di dalam jaringan sosial ekonomi (Sytych and Kim 2018). Dalam tulisan yang berjudul *'The Rural School Community Centre'* disebutkan pula modal sosial merupakan aset yang berharga di dalam masyarakat (Hanifan 1916). Bagi masyarakat nelayan, modal sosial dapat muncul melalui sifat interaksi yang berlangsung lama dan terikat secara emosional (Louhenapessy, Andaki, and Longdong 2017). Oleh karena itu, kolektivitas di antara sesama nelayan dapat terbangun berdasarkan

kepercayaan (*trust*) baik pada relasi ekonomi yang bersifat vertikal maupun horizontal (Wibowo, Kinseng, and Sumarti 2017). Unsur kepercayaan (*trust*) yang tinggi diantara sesama nelayan akan memberikan dampak yang cukup bernilai bagi nelayan terutama pada saat mengalami situasi sulit (Ulfa 2018).

Penelitian tentang modal sosial yang dikaitkan dengan penggunaan alat tangkapan ikan masih jarang dilakukan. Padahal penggunaan alat tangkapan ikan tidak hanya dimaknai sebagai “alat” untuk menangkap ikan, tetapi terdapat pula makna lain seperti adanya pengetahuan lokal nelayan yang bersifat turun temurun, adanya nilai serta norma yang melekat atas penggunaan alat tangkap ikan (Satria 2015). Dalam hal perumusan kebijakan, setiap agenda pembangunan seharusnya tidak menciptakan *gap* antara masyarakat dan pemerintah (Sanit 2010). Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan bertolak pada dimensi pembangunan sosial dimana setiap agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat memperhatikan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tersebut (Jamaluddin 2016). Karakteristik yang berkenaan dengan nilai, norma beserta aspek sosial budaya lainnya akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan (Sulistiyarto 2012). Dengan demikian, kontribusi serta capaian dari hasil kajian ini nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang paling sesuai dengan lokalitas dan karakteristik masyarakat nelayan.

B. Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Di dalam penelitian kualitatif, realitas sosial merupakan data yang diperoleh melalui gejala sosial yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat beserta implikasinya terhadap interaksi dan hubungan sosial yang berlangsung (Creswell 2015). Maka objek kajian di dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan pengguna cantrang itu sendiri, serta keberfungsian modal sosial atas penggunaan cantrang sebagai sarana pembentuk kolektivitas dan jaringan kerja

pada relasi sosial ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Batang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur yang bersifat *open-ended* (berfokus pada kedalaman informasi) dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama informan utama, informan kunci, dan informan pendukung. Informan utama yaitu nelayan pengguna cantrang itu sendiri yang terdiri dari pemilik kapal (Bapak KKH, SSWN, PNJ, dan FJR) dan nelayan ABK (Bapak RHMN, YYN, HSTN, dan AHMD). Selanjutnya informan kunci terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang (Bapak AND) , Syahbandar Perikanan Batang (Bapak MZ), dan HNSI Kab. Batang (Bapak BSYR). Sedangkan informan pendukung terdiri dari Galangan kapal, Pengusaha perikanan di TPI (Bapak WHNY), Pengusaha Pengolahan makanan berbahan dasar ikan (Ibu TM) dan Usaha Dagang (UD) Batang. Analisis data dilakukan melalui triangulasi data kualitatif dengan model analisis deskriptif..

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aktivitas Perikanan Tangkap di Wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Batang

Sejak didesain dan diperkenalkan pada masyarakat nelayan di Pantai Utara Jawa Tengah pada tahun 1980, penggunaan cantrang berkembang pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Batang. Selain modal yang terjangkau, keuntungan lain dari menggunakan cantrang adalah perbekalan yang dibawa saat akan melaut juga cenderung lebih hemat dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Selanjutnya Kabupaten Batang juga merupakan salah satu wilayah perikanan dengan potensi perikanan tangkap yang cukup besar di Provinsi Jawa Tengah. Selain memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat nelayan, realitas penggunaan cantrang telah memberikan sumbangsih yang cukup besar pula terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh AND sebagai Staf perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang:

“Hampir 85% alat tangkap yang digunakan itu cantrang, untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) betul Jawa Tengah udah kelihatan kalau kapal yang digunakan itu cantrang. Ada berapa mbak pendapatan yang dihasilkan setiap tahunnya dari penggunaan cantrang disini, begitu pula sebaliknya, kalau cantrang ditutup penggunaannya yah sebetulnya juga akan ada berapa M juga yang akan hilang kalau ditutup penggunaan cantrang itu, 1 dari sisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu dari sisi pemerintah rugi, dari sisi Pemerintah Kabupaten juga rugi, gitu mbak”. (Wawancara Bapak AND, Agustus 2017)

Hal serupa dipertegas pula oleh YYN yang bekerja sebagai nelayan ABK (Anak Buah Kapal) di kapal cantrang:

“Jadi kalau penggunaan Cantrang oleh Nelayan Batang ini yo bagi sisi nelayan memang merupakan alat tangkap yang sangat diandalkan itu. Alat tangkap aktif itu yah alat tangkap yang ditarik. Yah andalan gitu yah berarti andalan, yah hasilnya banyak, lalu kemudian uangnya juga banyak. Begitu, andalan jadi mbak.” (Wawancara Bapak YYN, Agustus 2017).

Besarnya keuntungan yang diperoleh nelayan cantrang sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat dilihat pula melalui data statistik produksi dan nilai produksi perikanan Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp x Rp.1000)
1	Kabupaten Rembang	40.566,60	222.555.879,00
2	Kabupaten Pati	38.717,40	161.896.729,00
3	Kota Pekalongan	29.931,60	132.471.063,00
4	Kabupaten Batang	35.678,60	240.427.385,00
5	Kota Tegal	29.226,40	177.715.114,00

Sumber: *Jawa Tengah dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*

Berdasarkan informasi nelayan dan data statistik di atas, terlihat jelas bahwa cantrang bagi masyarakat nelayan di Batang tidak hanya sekedar menjadi alat tangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melainkan pula sebagai alat tangkap ikan yang bersifat aktif dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan di Kabupaten Batang. Menurut data perikanan tangkap Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, produksi perikanan

yang dihasilkan oleh Nelayan di Kabupaten Batang memperoleh peringkat ke 4 terbesar di Jawa Tengah dengan total produksi sebesar 35.678,60- ton dan nilai produksi sebesar Rp. 240.427.385,00. Dari total nilai produksi tersebut, nelayan di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Batang setiap tahunnya berhasil memberikan sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang cukup besar pula. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Batang memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah maupun nasional.

Selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang terkait jumlah nelayan di Kabupaten Batang dari Tahun 2007 - 2016, yakni:

Tabel 2. Jumlah Nelayan di Kabupaten Batang Tahun 2007 - 2016

No	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)		
		Nelayan Juragan/Pemilik	Nelayan Pandega/ABK	Jumlah Nelayan
1	2	3	4	5
1	2007	594	9.731	10.325
2	2008	651	10.338	10.989
3	2009	656	10.338	10.994
4	2010	622	10.311	10.933
5	2011	664	10.339	11.003
6	2012	675	10.389	11.064
7	2013	653	10.412	11.065
8	2014	663	10.437	11.100
9	2015	622	10.385	11.007
10	2016	670	10.385	11.055
	Total	5.800	92.680	98.480

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, 2017

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017 jumlah nelayan di Kabupaten Batang untuk kategori nelayan juragan/ pemilik kapal berjumlah 670 orang nelayan, sedangkan nelayan Pandega/ ABK berjumlah 10.385 orang nelayan. Besarnya angkatan kerja nelayan di Batang inilah yang kemudian menjadikan aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Batang tergolong cukup produktif.

2. Modal Sosial Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang Pantai Pelabuhan Perikanan Tangkap Kabupaten Batang

Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (*strong community*), maupun masyarakat sipil yang kokoh. Elemen-elemen modal sosial seperti kepercayaan, kohesifitas, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, meningkatnya rasa tanggung jawab, tumbuhnya partisipasi serta solidaritas kelompok, dan menguatnya keserasian masyarakat (Louhenapessy et al. 2017). Cantrang bagi masyarakat nelayan di Batang dan bagi pelaku usaha perikanan di Batang tidak hanya dimaknai sebagai alat tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan sebagai perangkat kultur tentang cara menangkap ikan yang melekat melalui kebiasaan-kebiasaan nelayan terdahulu di Batang. Hal ini sebagaimana ungkapan bapak PNJ sebagai nelayan pemilik kapal cantrang:

“Masalahnya cantrang itu yo kebiasaan mbak, sudah jadi budaya loh mbak disini. Sebelumnya kan Trawl, yang digunakan pukat Harimau, itu sekitaran tahun 1970 sampai 1980an. Tapi pada saat itu kan pak Soeharto udah marah, trus diganti mancing, trus gak sukses kan mbak, trus diganti lagi porsin gak sukses. Jadi nelayan itu kayak di jadikan boneka nelayan oleh pemerintah yang gampang di otak-atik sementara nelayan terus rugi pada saat itu” (Wawancara dengan Bapak PNJ, Agustus 2017)

Hal serupa dipertegas pula oleh RHMN yang bekerja sebagai nelayan ABK (Anak Buah Kapal) di kapal cantrang:

“ditahun 1980 lah baru ketemu cantrang, cantrang itu katanya waktu proses masuknya itu dikatakan gabungan dari purse sein dan trawl, ketemulah cantrang mbak. Kalau trawl itu ditarik dari, ini kan misalnya mbak disitu Pekalongan-disini Batang, kalau Trawl kan bisa dari sini sampai sana mbak, yah jadi dilarang karena di tarik trus, lah pada saat itu nelayan gak terima toh, jadi yah tetap mengambil ikan dengan menggunakan Trawl, tapi sekarang yo kita pakai cantrang” (Wawancara dengan Bapak RHMN, Agustus 2017)

Solidaritas nelayan pengguna cantrang di Batang dalam merespons kebijakan pemerintah juga ditunjukkan melalui sifat keterbukaan nelayan yang mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan kajian strategis terlebih

dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cantrang.

Berikut ungkapan bapak FJR :

“artinya kan ini kembali lagi berdasarkan ilmu mbak, yang ngomong itu kan harus pakar, pakarnya di bidang itu loh, apakah ini akan merusak di masa depan, lah itu baru silahkan dihapuskan. Tapi ini jangan di Politisasi. Karena pemerintah punya program kayak gini, akhirnya pemerintah yang benar sendiri, oh atau barangkali ada profesor lain, yang bisa menyampaikan atau bisa mengadu argumenlah gitu. Ia, jadi benar-benar kalau memang cantrang itu merusak, kenapa gak dari dulu dilarang pengoperasiannya kan” (Wawancara dengan Bapak FJR, Agustus 2017)

Kajian strategis yang melibatkan nelayan dalam keseluruhan proses uji kelayakan cantrang merupakan harapan nelayan. Kejelasan atau transparansi dari pemerintah secara jelas tentang mengapa cantrang dilarang beroperasi, bagaimana manfaat serta solusi seperti apa yang akan dilakukan pemerintah harus secara jelas disampaikan langsung kepada nelayan. Hal ini sebagaimana ungkapan bapak MZ selaku syahbandar perikanan:

“Kalau cantrang merusak, tinggal dibilang aja kan misalnya atau penguatan peraturan, kalau wilayahnya di kota itu gak masalah. Tapi kalau misalnya WPT (Wilayah Perikanan Tangkap) kalau dituju ke daerah situ terkait aman gak cantrang itu kayak menghalangi pekerjaan nelayan mbak, menghalangi *nelayan berkembang biak*. Memang ia saya akui kadang ada yah nelayan nakhoda yang seharusnya gak di bolehin menangkap ikan di wilayah yang dilarang, tetapi kadang ada yang melanggar, itu rata2 oknum yah mbak, itu sebetulnya maling tok. Kalau nelayan asli dari Batang disini, tidak begitu soalnya” (Wawancara dengan Bapak MZ, Agustus 2017)

Sebagai sebuah ikatan sosial, Putnam (2000) dalam (Turner 2018) menyebutkan bahwa modal sosial yang terdiri dari jaringan sosial (*network*), adanya norma sosial (*norm*) yang mengikat, serta adanya kepercayaan (*trust*) akan memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Di dalam permasalahan ini, nelayan pengguna cantrang merupakan objek yang secara langsung menerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu, antara kebijakan pemerintah dan kepentingan nelayan adalah dua hal yang seharusnya saling berkolaborasi agar ditemukan solusi yang paling tepat terkait penggunaan alat tangkap ikan.

a. Jaringan Sosial (*Social Network*) Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang di Batang

Secara struktural, eksistensi cantrang pada masyarakat nelayan telah membentuk jaringan sosial yang menjadikan seluruh anggota masyarakat nelayan dapat bekerja sama dalam bingkai kolektivitas. Hubungan yang didasari oleh adanya modal sosial ini kemudian menjadi penguat pula di dalam aktivitas ekonomi. Hubungan produksi yang positif dan bersifat repositas membentuk solidaritas masyarakat nelayan di Batang dalam mempertahankan eksistensi cantrang sebagai alat tangkap ikan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh WHNY selaku pengurus dan pengusaha di TPI Kab. Batang:

“Penggunaan cantrang terbesar ada di Jawa Tengah Mbak, kalau di Batang ini misalkan kapalnya besar, otomatis hasilnya juga semakin banyak. Nah itu hasilnya itu yang banyak yang membuat TPI selalu full, usaha dagang UD juga, baik itu dari sisi penjual ikan juga rame, yang membeli ikan juga rame, baik dari pelaku usaha seperti penjual bakso atau pembuat nugget-nugget itu, sosis-sosis itu juga bahan mentahnya itu ikannya dari sini mbak, jadi memang cantrang itu banyak ikan yang di dapat, makanya banyak orang dari sana-sana itu ambil ikan disini juga” (Wawancara dengan Bapak WHNY, Agustus 2017)

Bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Batang, keberadaan cantrang sebagai alat tangkapan ikan merupakan aspek positif yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, besarnya angkatan kerja nelayan juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan tingkat intensitas pemanfaatan wilayah tangkapan laut menjadi cukup tinggi di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Batang. Dari hasil penelitian ditemukan nelayan di Kabupaten Batang dibedakan atas nelayan juragan / nelayan pemilik kapal dan nelayan pandega atau nelayan buruh yang bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) yang dipekerjakan menjadi tenaga pengoperasian alat tangkapan ikan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh HSTN sebagai nelayan ABK:

“Disini mbak ada nelayan pemilik kapal cantrangan, ada nelayan pemilik kapal kecil 5 GT, 10 GT, 15, GT sampai yang paling besar itu ada yang 60 GT seperti itu kalau rata-rata penghasilannya 1 bulan bisa 100 juta dari hasil menangkap ikan dengan cantrang. Yahh kan, tapi yah, yah tidak musti. Kadang-kadang yah, yah 50 Juta. Ada juga nelayan itu pendega

atau istilahnya Anak Buah kapal seperti saya ini, jadi sebagai tenaga kerja saja, ada juga nelayan ABK mbak sebagai motoris kapal, yang pegang mesin. Jadi alau disini mbak semua masyarakat sini kena dampak semua, banyak *nelayan-nelayan tumbuh*, trus seperti orang becak, orang pasar, orang-orang di warung dekat sini juga terasa. Jadi gak Cuma nelayan aja, tapi sampai ke pasar, supir-supir angkot semua kena dampaknya, karena bakalan rame” (Wawancara dengan Bapak HSTN, Agustus 2017)

Berdasarkan fakta di atas, maka benar adanya bahwa modal sosial dapat diartikan sebagai kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Lewat jaringan kelembagaan inilah kemudian setiap orang yang menjadi anggota suatu kelompok akan senantiasa memperoleh dukungan secara kolektif (Bourdieu 1986). Jaringan sosial merupakan modal positif yang menjadi aset berharga di dalam masyarakat. Hubungan positif tersebutlah yang kemudian mengikat setiap anggotanya untuk dapat saling bekerja sama.

Berikut adalah tabel jaringan sosial aktor dalam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan pengguna cantrang yang melekat secara relasional di wilayah Pantai Pelabuhan Perikanan Batang :

Tabel 1. Jaringan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang di Pantai Pelabuhan Perikanan Kab. Batang

No	Kategori Aktor di dalam Formasi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Batang	Hubungan Kategori Aktor dengan Penggunaan Cantrang
1	Nelayan Subsisten (<i>Subsistence Fishers</i>), nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari <ul style="list-style-type: none"> o Nelayan dengan Perahu kecil berukuran 2,8 - 3 meter 	Cantrang bersifat aktif dan produktif. Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan yang diperoleh dengan menggunakan cantrang selama ini dapat dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagiannya dapat dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
2	Nelayan Asli (<i>Native / Indigenous Aboriginal Fishers</i>), nelayan dengan karakter yang sama seperti nelayan subsisten, namun melakukan aktivitas perikanan secara lebih	Cantrang sebagai alat tangkap yang bersifat aktif dan produktif. Modal operasional yang dibutuhkan masih terjangkau karena cantrang lebih murah daripada alat tangkap yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk permodalan biasanya akan dibantu oleh nelayan kapal besar, pengurus TPI dan juga koperasi nelayan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan

	komersial dengan skala yang kecil.	dengan cantrang dapat dijual kepada para pengusaha dan penjual ikan di TPI, dan sisanya akan dikonsumsi sendiri.
	<ul style="list-style-type: none"> o Nelayan pemilik kapal dengan ukuran 5 - 10 GT (<i>gross ton</i>) 	
3	Nelayan Komersial (<i>Comercial Fishers</i>), kategori nelayan yang menangkap ikan dengan tujuan komersial, dan dipasarkan secara domestik dan ekspor dalam skala yang kecil maupun besar.	Cantrang selain sebagai alat tangkapan ikan, juga merupakan simbol mata pencaharian yang melekat (<i>embedded</i>) pada jaringan ekonomi kelompok nelayan beserta masyarakat pesisir lainnya di Batang. Sebagai modal ekonomi yang melekat, cantrang bersifat aktif dan produktif. Modal Kapital yang dibutuhkan atas penggunaan cantrang juga dapat dipenuhi oleh nelayan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan dengan menggunakan cantrang dapat dirasakan oleh seluruh aktor ekonomi yang terlibat dalam jaringan sosial ekonomi masyarakat di Batang.
	<ul style="list-style-type: none"> o Nelayan pemilik kapal 10- 30 GT (<i>gross ton</i>) o Nelayan pemilik kapal 30 - 60 GT (<i>gross ton</i>) 	
4	Nelayan ABK (Anak Buah Kapal) / Nelayan Pandega	Ekonomi Angkatan kerja ABK (Anak Buah Kapal) sangat bergantung pada produktivitas kapal-kapal nelayan pemilik. Karena sifat cantrang yang aktif dan produktif, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penangkapan ikan di laut dapat menutupi biaya operasional yang dikeluarkan sejak awal sebelum kapal berangkat ke laut. Biaya operasional meliputi; servis dan bongkar kapal, perbekalan untuk keluarga ABK di rumah, perbekalan selama di laut, serta biaya perbaikan jaring tangkapan ikan.
5	Pengusaha Pengolah Hasil Ikan.	Keterlibatan hubungan ekonomi antara nelayan dan masyarakat pengusaha pengolah hasil ikan sudah berlangsung sejak lama. Bahan mentah ikan yang digunakan dalam pengelolaan sebagian besar diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang dibawa oleh kapal-kapal nelayan cantrang saat kembali ke daratan.
	<ul style="list-style-type: none"> o Pemindang Ikan o Pengusahaan terasi, tepung dan kerupuk ikan 	
6	Pengusaha Ikan di TPI	Keterlibatan hubungan ekonomi antara nelayan dengan Pemborong ikan di TPI dan penjual ikan bakul kecil juga sudah berlangsung cukup lama. Persediaan ikan yang diborong atau di beli di TPI untuk dijual kembali ke kota-kota lain atau ke pasar, sebagian besar juga diperoleh dari hasil tangkapan kapal-kapal nelayan yang menggunakan cantrang.
7	Penjual Ikan <i>Bakul-bakul Kecil</i>	
8	<i>Galangan Kapal</i>	Eksistensi cantrang dalam aktivitas perikanan tangkap di Batang juga sangat bergantung pada jasa Galangan Kapal. Galangan kapal biasanya dijadikan sebagai tempat membuat kapal, memperbaiki kapal dan alat tangkap, perbaikan konstruksi lambung kapal, mesin inti, dan lain-lain.
9	Syahbandar Perikanan	Syahbandar perikanan memiliki peranan yang cukup penting dalam aktivitas perikanan tangkap di Batang. Selain bertugas mengurus surat persetujuan berlayar dan memastikan kapal dalam keadaan baik sebelum berangkat ke laut, syahbandar perikanan di Batang juga

		akan memastikan kelayakan alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan.
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang Jawa Tengah	Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dinilai juga sangat memberikan pengaruh terhadap aktivitas perikanan tangkap di Batang. Selain mengawasi bidang usaha dan pengelolaan TPI, aktivitas menangkap ikan menggunakan cantrang oleh nelayan juga menjadi pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang.

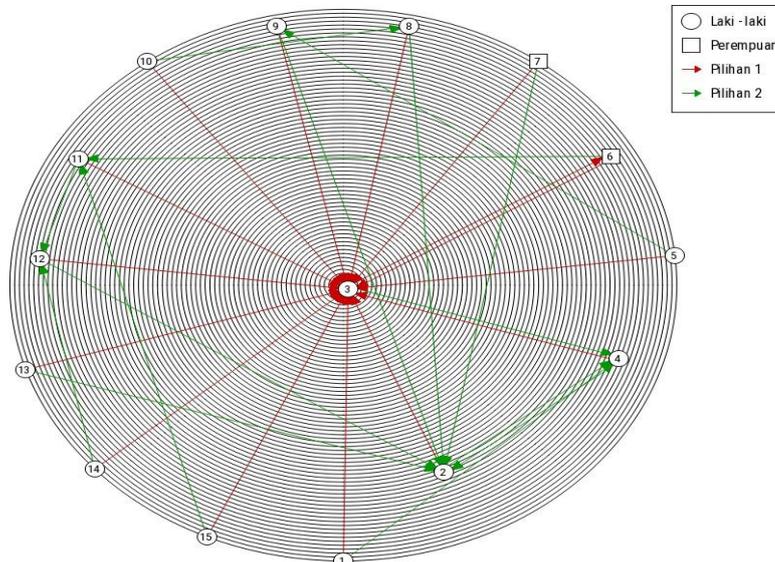
Sumber: *Data Primer Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa cara produksi (*mode of production*) dan kekuatan produksi di dalam jaringan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Batang bersifat saling terhubung dalam dimensi ekonomi yang bersifat *embedded* (terlekat). Cantrang sebagai alat kerja produksi pada arena ekonomi aktor di dalam pengalaman sehari-harinya telah memberikan banyak kontribusi bermakna. Berikut adalah hasil tabulasi indeks pemilihan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan yang aktif dan produktif di Kabupaten Batang:

Tabel 2. Tabulasi Indeks Pemilihan Penggunaan Cantrang

No.	Kategori Aktor	Nilai
1.	Nelayan Cantrang Subsisten (Subsistence Fishers)	0/14 = 0
2.	Nelayan Cantrang Asli (Native Indigineous Fishers)	18/14 = 1.29
3.	Nelayan Cantrang Komersial (Comercial Fishers)	70/14 = 5
4.	Nelayan Anak Buah Kapal (ABK) Cantrang/ Pandega	9/14 = 0.64
5.	Pengusaha Pengolahan Hasil Ikan	0/14 = 0
6.	Pengusaha/ Pemborong Ikan di TPI	5/14 = 0.36
7.	Penjual Ikan Bakul Kecil	0/14 = 0
8.	Galangan Kapal dan Martunis Kapal	3/14 = 0.21
9.	Usaha Dagang (UD) Batang	3/14 = 0.21
10.	Syahbandar Perikanan	0/14 = 0
11.	HNSI Batang	6/14 = 0.43
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang	6/14 = 0.43
13.	Polisi Air Batang	0/14 = 0
14.	Kapolres Batang	0/14 = 0
15.	Bupati Batang	0/14 = 0

Berdasarkan tabel penilaian di atas, maka sosiogram pada jaringan sosial aktor ekonomi pada masyarakat nelayan di Batang menunjukkan sifat hubungan sebagaimana yang tergambarkan pada diagram lingkaran di bawah ini:



Gambar 1. Sosiogram Jaringan Sosial Aktor Masyarakat Nelayan di Batang

Berdasarkan tabulasi indeks penilaian dan sosiogram di atas, terlihat bahwa kategori Nelayan Cantrang Asli (*Native Indigineous Fishers*) dan Kategori Nelayan Cantrang Komersial (*Comercial Fishers*) memperoleh nilai paling tinggi yakni 18/ 14 dan 70/14. Nilai ini merepresentasikan kuatnya keberadaan aktor nelayan pengguna cantrang di Kabupaten Batang sebagai elemen utama dalam keberlanjutan aktivitas ekonomi berbasis perikanan di Kabupaten Batang. Oleh karena itu sebagaimana gambar sosiogram di atas, maka kategori no 3 yakni Nelayan Cantrang Komersial (*Comercial Fishers*) menduduki posisi sentra yang sangat memberikan pengaruh berarti bagi aktor lainnya dalam jaringan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Batang.

Selain itu, sifat jaringan kerja masyarakat nelayan didasari adanya hubungan saling kenal, saling mengikat, saling menghubungkan serta saling mengaitkan. Adapun beberapa aspek modal sosial, yakni: adanya hubungan yang bersifat mengikat (*bonding social capital*), bersifat menjembatani (*bridging social capital*) yang terjalin pada aktivitas ekonomi yang berbeda, dan bersifat mengaitkan (*linking social capital*) di dalam aktivitas formal (Woolcock and Narayan 2000).

Berdasarkan Tabel 1, Aspek modal sosial yang bersifat *bonding* dan *bridging* (mengikat dan menjembatani) terlihat melalui intuisi atau mekanisme kerja sama masyarakat nelayan di Batang dalam mewujudkan tujuan bersama. Salah satunya adalah berupaya bersama sampai “*menjerit darah*” dalam mempertahankan eksistensi penggunaan cantrang sebagai alat kerja yang aktif dan produktif. Keterlibatan beberapa aktor dalam aksi protes tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang mengarah kepada kolektivitas aktor-aktor untuk bergerak bersama mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mendatangi gedung Kementerian di Ibu kota Jakarta, hingga melakukan aksi pembakaran alat tangkap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan (FGD, Agustus 2017)

Bentuk hubungan yang bersifat penghubung atau menjembatani juga terlihat melalui pola kerja sama ekonomi yang baik diantara setiap aktor agar saling memberikan keuntungan dan biasanya juga dijadikan momen kerja sama dalam bertukar informasi. Bentuk hubungan tersebut terlihat pada beberapa kegiatan seperti pada saat pelelangan ikan di TPI dimana para pengusaha perikanan akan bertemu dengan banyak pengusaha perikanan lainnya yang datang dari wilayah lain. Nelayan pemilik kapal-kapal besar biasanya terlebih dahulu akan mempercayakan hasil tangkapan ikannya kepada pengurus di TPI yang merupakan warga asli Batang. Namun disisi lain, warga asli Batang yang merupakan pengurus di TPI juga sewaktu-waktu akan merekomendasi pengurus lainnya (dari luar Batang) yang dapat dipercaya kepada nelayan pemilik kapal cantrang untuk melelang ikan milik nelayan di TPI. Di TPI Batang, para pengurus juga biasanya akan menghubungkan para pengusaha makanan yang membutuhkan bahan mentah ikan untuk kepentingan usahanya, beserta penjual ikan dalam skala kecil agar dapat memperoleh ikan dari nelayan cantrang guna memperoleh ikan-ikan yang berkualitas (FGD, Agustus 2017)

Selanjutnya adalah *linking social capital*, sifat hubungan kerja masyarakat nelayan pengguna cantrang juga terkait dengan beberapa institusi atau lembaga seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Batang, POL AIR Provinsi Jawa Tengah, Pengurus Pelabuhan Perikanan Batang, Bupati Batang, Kapolres Batang, UD (Usaha Dagang) Batang, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Batang (HNSI) Kab. Batang. Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang, Nelayan pengguna cantrang biasanya aktif terlibat saat pihak dinas mengadakan sosialisasi alat tangkap ikan dan area tangkapan ikan sesuai dengan kapasitas kapal yang dimiliki nelayan. Selanjutnya dalam hal permodalan kapal, Dinas Kelautan juga biasanya akan menjadi pengait atau penghubung komunikasi antara nelayan pengguna cantrang dengan Pihak Bank (biasanya bank BRI) khususnya saat ingin mengganti kapal atau mengganti mesin kapal yang dianggap sudah tidak layak untuk dipakai berlayar (Wawancara dengan UD Batang, Agustus 2017)

Pada saat nelayan cantrang melakukan aksi protes di Kantor Kementerian Jakarta serta di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang juga turut mengambil peran dalam mengadvokasi kebutuhan dan kerugian operasional yang dirasakan nelayan terkait larangan penggunaan cantrang. Dicabutnya sertifikat kelayakan cantrang sebagai alat tangkap tersebut akhirnya berdampak pula pada pendapatan nelayan dan PAD dari sektor perikanan Provinsi Jawa Tengah.

b. Kepercayaan (*trust*) Pada Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang di Batang

Kepercayaan merupakan modal sosial yang berperan penting bagi masyarakat nelayan pengguna cantrang di Batang untuk cenderung saling bekerja sama dan saling percaya saat musim paceklik maupun cuaca buruk. Bourdieu melalui *'The Form of Capital'* menegaskan mengenai fungsi modal sosial dalam hal ketahanan sosial terdapat modal *immaterial* yang dalam fungsinya akan merepresentasikan bagaimana fungsi-fungsi sosial bekerja dalam masyarakat saat dihadapkan pada beragam situasi (Bourdieu 1986). Keberfungsian modal sosial dalam situasi sulit bagi nelayan dapat terlihat dari adanya bentuk kepercayaan yang tinggi untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah (Suparyana, Pande Komang, Eka Indrawan, I Putu, and

Syaputra, Maiser 2021). Nelayan merupakan masyarakat dengan jenis pekerjaan yang berisiko, oleh karenanya penghasilan yang dihasilkan pun akan sangat bergantung pada kondisi alam dan cuaca saat melaut. Wibowo dkk. dalam hasil kajiannya yang menyebutkan kolektivitas diantara sesama nelayan dapat terbangun berdasarkan kepercayaan (*trust*) baik itu pada relasi ekonomi yang bersifat vertikal maupun horizontal (Wibowo et al. 2017)

Dalam keadaan untung atau rugi nelayan pemilik kapal cantrang di Batang biasanya tetap akan memberikan upah kepada nelayan ABK sebagaimana biasanya dan tanpa mengurangi upah tersebut. Pada nelayan ABK misalnya saja perbekalan sudah akan diterima sejak awal kapal akan berangkat melaut. Perbekalan tersebut biasanya diberikan kepada istri atau keluarga sebagai bekal selama ditinggal pergi melaut. Hal ini sebagaimana ungkapan AHMD yang bekerja sebagai nelayan ABK:

“Trus kan tinggalan di rumah, itu ada ditinggalin untuk kami, Istri ditinggali perbekalan juga, 800 ribu sampai 1 juta atau berapa, jadi bagian dari perbekalan juga itu mbak. Saya itu mbak sudah 8 tahun ikut jadi ABK di salah satu nelayan pemilik kapal disini, pakai cantrang juga ya sama. Gak ada ditahan-tahan untuk istri dan anak, apalagi kita kerja berhari-hari, lama toh. Jadi ya kita saling percaya. Kadang-kadang saya suka kasbon pinjaman gitu. Keluarga ada kebutuhan. Ya dikasih, kadang2 saya cari kerjaan tambahan lain, gak masalah juga.” (Wawancara dengan Bapak AHMD, Agustus 2017)

Selanjutnya Kepercayaan yang tinggi diantara sesama nelayan juga akan memberikan dampak yang cukup bernilai bagi nelayan (Ulfa 2018). Pada Nelayan di Batang, hubungan yang bersifat kekeluargaan dan saling percaya ini ditunjukkan pula oleh nelayan pemilik kapal cantrang yang tidak ragu dalam memberikan bantuan pinjaman kepada nelayan ABKnya saat sedang mengalami kesulitan. Berikut ungkapan bapak PNJ selaku pemilik kapal cantrang :

“ABK kalau sudah berangkat, mereka sudah pasti pulang harus bawak uang, ada semacam ditalangi 1 juta, dihitung ada berapa ABK, ternyata dengan termasuk juru mudi, maka ada sekitar 20 orang. Masing-masing kita kasih semuanya. Misalnya kurang ada kebutuhan mendesak, saya kasih lebih saya ngasih pinjaman ke ABK, karena gak mungkin toh dibiarkan nelayan gitu aja, apalagi kalau sudah masa pakeklik,

pendapatan kita juga turun, tapi tetap saya kasih aja mbak.” (Wawancara dengan Bapak PNJ, Agustus 2017)

Selanjutnya dalam hal teknis, hubungan kerja juga terlihat dari bagaimana nelayan pemilik kapal yang biasanya mempercayakan pengurus di TPI yang berasal dari warga asli Batang untuk melakukan bongkar kapal. Untuk perbaikan mesin kapal dan pergantian alat tangkap biasanya juga akan dikerjakan oleh motoris kapal dan galangan kapal yang juga merupakan warga asli Batang.,

“Ia, ada pengurusnya mbak. Kan nelayan kan hanya membongkar saja, nah nanti yang mengurus di TPI itu yah pengurus, pengurusnya kapal. Ia pengurus masing-masing kapal udah ada, makanya kan kalau kapal Batang tadi saya bilang, maksudnya yah di Jualnya pengurusnya yang disini yah rata-rata juga warga asli Batang. Sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu, Artinya itu kan sebagai tumpuan untuk kehidupan keluarga yah. Nanti misalnya mesin rusak, atau ada alat tangkap yang rusak atau perlu diganti motoris kapal dan galangan juga yah dari sini, bukan dari lain-lain lagi” (Wawancara dengan Bapak BSYR, Agustus 2017)

Hubungan kerja yang baik antar sesama nelayan pengguna cantrang, pelaku usaha perikanan, dan elemen aktor ekonomi lainnya telah memberikan manfaat keberlanjutan yang bersifat saling menguntungkan. Hasil tangkapan ikan dengan cantrang yang sangat produktif telah memberikan peluang usaha yang cukup besar pada bidang perikanan khususnya di wilayah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Louhenapessy dkk. yang juga menemukan bahwa pengaruh dari produktivitas sebuah alat tangkap ikan akan memberikan manfaat keberlanjutan bagi usaha perikanan di setiap wilayah (Louhenapessy et al. 2017).

c. Nilai dan Norma (*Norm*) Pada Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang di Kabupaten Batang

Nilai merupakan gagasan mengenai suatu pengalaman berarti yang mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang atas suatu tindakan (Ansaar 2019). Oleh karenanya nilai menjadi komponen yang penting dari sebuah kebudayaan atau kebiasaan orang-orang dalam bertindak dan bertingkah laku. Artinya suatu tindakan dianggap sah secara moral dan dapat diterima jika tindakan tersebut selaras (harmoni) dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung bersama oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan.

Tradisi “*lampara dasar*” dan “*tandesan semu*” merupakan nilai sosial yang selama ini masih melekat pada aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Batang. *Lampara dasar* merupakan suatu bentuk pengalaman bernilai yang menjadi pengetahuan nelayan tentang cara menangkap ikan dengan cara melempar alat tangkap ke dasar laut atau dalam istilah lokal di Batang disebut dengan *nyebar arat*. *Nyebear arat* merupakan cara yang dilakukan nelayan untuk mendapatkan ikan-ikan kecil yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat nelayan di Batang. Kebiasaan mengonsumsi ikan-ikan kecil ini selanjutnya disebut dengan istilah *Tandesan semu*. Hal ini sebagaimana ungkapan HSTN:

“Lah ikan itu kan banyak dan menumpuk di dasar laut, jadi kita tu disini istilahnya lempar dasar atau *lampara dasar* kalau kita disini, caranya ya *nyebar arat* otomatis akan banyak ikan yang didapat, kita sebagai nelayan senang, pemilik kapal juga senang, nanti hasilnya juga banyak dan masyarakat-masyarakat lain ikut senang, Kalau udah senang gitu kan dari dulu sampai sekarang sampai ada cantrang kita punya aktivitas bagi-bagi sembako, kita duduk berdoa bersama sambil makan ikan, ikan kecil-kecil itu kita sebutnya *tandesan semu* karena kita bersyukur ikannya banyak” (Wawancara dengan Bapak HSTN, Agustus 2017)

Penggunaan Cantrang sebagai alat tangkap ikan yang diandalkan dalam kurun waktu yang cukup lama tidak lepas dari ketatnya nilai budaya yang mencerminkan kebiasaan masyarakat nelayan di Batang (Situmeang, 2018). Oleh karena itu, menghilangkan cantrang dari aktivitas perikanan tangkap nelayan di Batang dinilai tidak hanya sekedar mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat nelayan di Batang. Tetapi dianggap pula sebagai upaya menghapus tradisi menangkan ikan yang dilakukan nelayan secara turun-temurun dalam aktivitas penangkapan ikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh WHNY selaku pekerja di TPI:

“nelayan itu punya kekhawatiran besar, mereka kan bekerja di laut, berisiko, la, terus alat-alatnya mau di otak-atik diganti lagi, nelayan dulu sudah merasa diusik-usik kalau kata si mbah saya, terus mau disuruh2 ganti alat lagi sekarang. Kita tu kenalnya kan ada istilah “*jermal*” (semacam jaring yang bentuknya kantong) atau bisa disebut trawl, jadi dulu pakai itu awalnya. Tiba2 sekitar tahun 80an gitu disuruh ganti karena sampai ke dasar laut. Disuruhlah pakai cantrang, awalnya gak mau sampai menjerit darah nelayan disini. Lama juga itu mbak

penolakannya. Memang setelah itu tahun 1983an lah baru nelayan mulai mau diajak berkenalan sama cantrang, diajak coba di laut, diajak ikut memodifikasi juga sama pemerintah. Barulah diterima, ternyata sifat alatnya sama saja sesuai dengan kebiasaan nelayan, cuma bedanya tidak terlalu sampai ke dasar laut kalau cantrang itu. Tahun 1985 lah sudah aktif kita pakai cantrang. Jadi ya kita juga menganggap cantrang itu ya dari sini, dari Jawa Tengah asalnya. (Wawancara dengan Bapak SSWN, Agustus 2017)

Melekatnya cantrang sebagai alat produksi telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sifat keberlangsungannya dipengaruhi oleh pengetahuan lokal masyarakat nelayan di Batang yakni menabur jaring sampai ke dasar laut sejak dahulu sebelum cantrang diperkenalkan dan dikembangkan di Wilayah Perikanan Tangkap Jawa Tengah. Pengetahuan lokal merupakan aspek sosial budaya yang berharga dan terakumulasi di sepanjang sejarah kehidupan masyarakat nelayan karena sifatnya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan (Sulistiyarto 2012). Hal ini sebagaimana aktivitas menabur jaring sampai ke dasar laut yang diyakini masyarakat nelayan di Batang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh nelayan saja, tetapi dapat dirasakan pula oleh semua elemen masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir kawasan perikanan tangkap Kab. Batang.

Nilai sosial lainnya yang terdapat pada masyarakat nelayan di Batang adalah sikap saling tolong menolong dan peduli sesama melalui aktivitas bagi-bagi sembako yang dimulai sejak H-10 sebelum lebaran. Hal ini sebagaimana ungkapan ibu TW selaku pengusaha pengolahan makanan dengan bahan baku ikan di Batang:

“Hasil tangkapan ikan disini mbak banyak dan masyarakat-masyarakat lain ikut senang, cantrang ternyata juga menguntungkan kita, walau sempat ribut-ribut juga dulu itu sama pemerintah tahun 1980an lah kalau gak salah saya. Disini kalau udah senang gitu kan dari dulu sampai sekarang sampai ada cantrang kita punya aktivitas bagi-bagi sembako kalau sudah mau lebaran itu, kadang dimulai 15 hari sebelum hari raya, atau 10 hari sebelumnya, kita duduk berdoa bersama, karena kita bersyukur ikannya banyak” (Wawancara dengan Ibu TW Agustus 2017)

Nilai ini merupakan pengikat hubungan masyarakat nelayan yang mencerminkan kebersamaan. Pada aktivitas ini semua nelayan pemilik kapal pelaku pengusaha perikanan, bersama HNSI akan memberikan sembako kepada para keluarga ABK dan kepada seluruh masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir lainnya yang tinggal di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Batang, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu terdapat pula "*pesta nyadran*". *Nyadran* sendiri merupakan tradisi budaya yang mencerminkan sikap kebersyukuran nelayan terhadap hasil tangkapan ikan yang selama ini telah memberikan dampak positif pada aktivitas ekonomi nelayan di Batang. Tradisi *Nyadran* juga biasanya diselenggarakan oleh HNSI Batang (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Batang) ini biasanya juga dijadikan momentum oleh para nelayan, yang terdiri dari nelayan pemilik kapal-kapal cantrang, nelayan ABK, Pengurus PPI, dan TPI dalam mencap aspirasi (FGD, Agustus 2017).

Kemudian terdapat pula prinsip hidup "*obah mamah ana dina ana upa*" (bekerja pasti makan, ada hari, ada nasi). *Obah mamah ama dina ama upa* adalah prinsip kerja keras bersama dan tidak suka menganggur yang dimiliki oleh nelayan di Kabupaten Batang. Bagi mereka tidak berangkat melaut dianggap suatu perbuatan yang akan membawa nelayan pada kondisi kelaparan. Hal ini pula yang kemudian menjadikan masyarakat nelayan di Batang tetap melakukan *miyang* (pergi melaut) meskipun ada larangan penggunaan cantrang oleh pemerintah. Bahkan biasanya ketika ombak besar sekalipun, nelayan akan tetap pergi melaut, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh seorang informan nelayan ABK:

"Kita itu kalau gak berangkat melaut gak makan, apalagi jika sudah waktunya berangkat melaut tetapi tidak berangkat, yah itu biasanya kita rugi. Lah namanya juga nelayan untung-untungan. Jadi yah "*obah mamah ana dina ana upa*" kalau kita kerja yah kita makan. Itu udah prinsip nelayan disini dari dulu" (Wawancara dengan Bapak AHMD, Agustus 2017)

Selanjutnya norma (*norm*), norma pada masyarakat nelayan di Batang tidak lepas dari adanya aturan yang disepakati sebagai kontrol sosial. Setiap

orang yang terlibat di dalam keanggotaannya diikat oleh suatu pola nilai dan norma sebagai pedoman bersikap dan berperilaku (Zamzami 2015). Oleh karenanya norma memainkan peran penting dalam mengontrol dan menjaga hubungan antar individu di dalam kelompoknya dan masyarakat (Soekanto 2002). Norma pada masyarakat nelayan di Kabupaten Batang tidak lepas dari kepercayaan lokal yang ada. Kepercayaan lokal seperti bentuk ritual keagamaan akan dapat membantu nelayan bertahan selama masa sulit berlangsung (Pontoh 2010). Bentuk norma yang bersumber dari kepercayaan lokal masyarakat nelayan di Batang adalah melakukan *zikir, istighosah, dan shalat tasbih* setiap hari Jumat. Ritual keagamaan ini bersifat rutin dilakukan oleh masyarakat nelayan di Batang bersama ustad atau kiyai sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan agar dijauhkan dari bencana alam.

Norma lain yang terdapat pada masyarakat nelayan di Batang adalah “*laik laut*”. *Laik laut* merupakan surat izin berlayar yang wajib dimiliki oleh seluruh nelayan di Batang. Setiap kapal yang berlayar akan diperiksa kelengkapan administrasi dan kelayakan kapal oleh Syahbandar Perikanan dan Polisi Air yang bertugas di wilayah perikanan tangkap Kab. Batang. Jika ada kapal yang tidak memiliki surat izin ini, maka harus kembali ke darat. Tujuan dari aturan ini adalah agar setiap pemilik kapal dapat lebih memperhatikan kelayakan kapal dan mesin sebelum berlayar. Hal ini difungsikan sebagai usaha mengurangi angka kecelakaan saat melaut. Sebagaimana ungkapan SSWN:

“lah ia kita menentang semua disini larangan itu. Kan gak ada solusi, yang ada kami rugi total. Nelayan ABK, sampai masyarakat yang “*bakul-bakul kecil*” pun ikut menentang. Lah karena memang nelayan kok yo diuji-uji coba, itukan persoalan perut dan keberlangsungan nasib nelayan. Nelayan terus saja “*nyebar arat*”, wong kita juga masih punya surat izin berlayar atau orang sini bilang “*laik laut*” ya sudah nelayan jalan terus mbak. (Wawancara dengan bapak SSWN, Agustus 2017)

Selain wajib memiliki surat izin melaut, nelayan pengguna cantrang di Batang juga memiliki kesepakatan bersama dimana setiap nelayan tidak dibenarkan menebar jaring cantrang pada wilayah laut yang sudah dipasang alat tangkap oleh nelayan lainnya. Hal ini merupakan bentuk upaya positif yang dilakukan agar tidak terjadi konflik antar sesama nelayan. Aturan lain yang juga

masih dipegang oleh nelayan pengguna cantrang di Batang khususnya bagi kapal-kapal besar adalah tidak menangkap ikan pada wilayah tangkapan ikan kapal-kapal kecil dan menyesuaikan wilayah tangkapannya sesuai dengan ukuran kapal yang dimiliki. Aktivitas pelaksanaan aturan ini biasanya juga akan diawasi pula oleh Polisi Air yang sedang bertugas. Oleh karena itu jika terdapat nelayan yang melakukan pelanggaran, maka nelayan harus menerima sanksi dari Syahbandar Perikanan dan Dinas Kelautan Kab. Batang, yakni tidak diizinkan melaut sampai waktu yang ditentukan.

Adapun bentuk-bentuk nilai dan norma sosial yang dimiliki oleh masyarakat nelayan pengguna cantrang dapat dibuatkan tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3. Nilai dan Norma Pada Masyarakat Nelayan Pengguna Cantrang di Batang

No	Nilai Sosial	Norma
1	<i>Lampara Dasar</i> , bentuk pengalaman bernilai yang menjadi modal pengetahuan nelayan menangkap ikan secara turun-temurun	Rutin mengadakan zikir, istighosah, dan shalat tasbih setiap hari Jumat bersama Ustad/ Kiyai. Norma yang bersumber dari kepercayaan lokal ini harus dipatuhi dan harus dilaksanakan setiap hari Jumat
2	<i>Tandesan Semu</i> , bentuk kebiasaan mengonsumsi ikan-ikan kecil secara turun-temurun	<i>Laik laut</i> , merupakan surat izin berlayar yang wajib dimiliki setiap kapal dan nelayan saat pergi melaut.
3	<i>Nyeban Arat</i> , bentuk pengalaman bernilai yang menjadi modal pengetahuan nelayan menangkap ikan secara turun-temurun	Tidak dibenarkan menebar jaring pada wilayah laut yang sudah ditebar jaring tangkap oleh nelayan lainnya
4	Tradisi Bagi-bagi sembako , adalah sikap kebersyukuran masyarakat nelayan di Batang terutama saat hari-hari besar	Menangkap ikan harus di wilayah yang sesuai dengan SOP dan ukuran kapal. Disini nelayan kapal besar (30 - 100 GT) tidak dibenarkan menangkap ikan di wilayah tangkapan ikan kapal-kapal kecil atau tidak terlalu besar (5 GT - 20 GT)
5	<i>Nyadran</i> , sebagai bentuk gelar budaya yang mencerminkan sikap kebersyukuran/ ungkapan rasa syukur yang dilakukan setiap tahun	Tidak menangkap ikan dengan cara mengebom, menggunakan racun, atau menggunakan listrik.
6	<i>"Obah mamah ana dina ana upa"</i> , sebagai prinsip hidup masyarakat nelayan di Batang yang tidak suka mengganggu sekalipun sedang dihadapkan pada situasi sulit	

Sumber: *Data Primer Hasil Penelitian.*

D. Penutup

Aktivitas ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan mencerminkan *mode of production* (cara kerja kolektif dan dominan dalam sistem ekonomi), penggunaan cantrang menduduki posisi sentra yang berpengaruh terhadap keberlanjutan aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Batang. Selain itu secara sosial budaya, modal sosial yang terbangun dibalik penggunaan cantrang tidak lepas dari adanya modal pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun tentang cara menangkap ikan seperti *lampara dasar* dan *nyebar arat*. Modal pengetahuan yang menjadi tradisi menangkap ikan tersebut diikat pula oleh nilai dan norma yang mencerminkan kuatnya hubungan primordial dan kekeluargaan di antara sesama aktor nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui kebiasaan seperti *tandesan semu*, tradisi bagi-bagi sembako, *tradisi nyadran* (gelar budaya), dan prinsip hidup bersama *obah mamah ana dina ama upa*, kepemilikan *laik laut*, kepatuhan terhadap SOP menangkap ikan, tertib terhadap pelaksanaan zikir dan istighosah.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berhubungan dengan kelautan dan aktivitas perikanan tangkap oleh pemerintah sudah seharusnya diawali dengan pemahaman strategis terhadap karakteristik sosial budaya, sosial ekonomi, modal pengetahuan, serta keberfungsian nilai dan norma yang dimiliki oleh nelayan agar diperoleh suatu model kebijakan yang tepat dan sesuai. Dengan demikian, maka *gap* dan konflik vertikal antara nelayan dan pemerintah dapat dihindari. Dihapusnya cantrang dalam aktivitas perikanan tangkap di Batang tanpa ada solusi yang paling sesuai dengan modal pengetahuan nelayan dinilai tidak hanya mematikan aktivitas ekonomi dalam jaringan ekonomi di Batang. Namun secara sosial budaya, dimaknai pula sebagai upaya penghapusan terhadap tradisi menangkap ikan (modal pengetahuan) yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Daftar Pustaka

- Ansaar, Ansaar. 2019. "SISTEM PENGETAHUAN PELAYARAN DAN PENANGKAPAN IKAN PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RANGAS, KABUPATEN MAJENE." *Walusuji: Jurnal Sejarah dan Budaya* 10(2):139-54. doi: 10.36869/wjsb.v10i2.2.
- Arumsari, Nugraheni, Wenny Dwika Paradita, and Tutik Wijayanti. 2020. "STRATEGI KOMUNIKASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN PANTAI UTARA DI KABUPATEN BATANG." 31:7.
- Bourdieu, Piere. 1986. "Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood: 241-58. | Socialcapitalgateway.Org." Retrieved August 3, 2022 (<https://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/bourdieu-p-1986-forms-capital-richardson-j-handbook-theory-and-research-sociology-educ>).
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ermawati, Nanik, and Zuliyati. 2015. "DAMPAK SOSIAL Dan EKONOMI ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)." *Proceeding SENDI_U*.
- Fukuyama, Francis. n.d. "Social Capital and Civil Society - Francis Fukuyama - Prepared for Delivery at the IMF Conference on Second Generation Reforms." Retrieved August 3, 2022 (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm>).
- Hanifan, L. J. 1916. "The Rural School Community Center." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 67(1):130-38. doi: 10.1177/000271621606700118.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. "Sosiologi Pembangunan."
- Kristi Dwi Utami. 2022. "Terpaksa Libur Melaut, Nelayan Cantrang Jateng Tuntut KKP Percepat Pengurusan Izin." *kompas.id*. Retrieved August 4, 2022 (<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/19/nelayan-cantrang-pantura-jateng-tuntut-kkp-percepat-pengurusan-izin-melaut>).
- Louhenapessy, Meify D., Jardie A. Andaki, and Florence V. Longdong. 2017. "MODAL SOSIAL PADA USAHA PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE DI AERTEMBAGA KOTA BITUNG." 5(9):8.
- Pontoh, Otniel. 2010. "IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA GANGGA DUA KABUPATEN MINAHASA UTARA." *JURNAL*

PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS 6(3):125. doi: 10.35800/jpkt.6.3.2010.156.

- Sanit, Drs. Arbi. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Situmeang, Marini Kristina. n.d. "Konstruksi Sosial Cantrang (Studi Fenomenologi Pada Nelayan Di Pantai Pelabuhan Perikanan Kabupaten Batang Jawa Tengah)." Thesis.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solikatun, Solikatun, and Nuning Juniarsih. 2019. "MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT DESA MARIA, KECAMATAN WAWO, KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." *Jurnal Analisa Sosiologi* 7(2).
- Sulistiyarto, Bambang. 2012. "Nilai dan Norma Sosial pada Masyarakat Nelayan untuk Memelihara Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Dataran Banjir Sungai Rungan, Palangka Raya." 5.
- Suparyana, Pande Komang, Eka Indrawan, I Putu, and Syaputra, Maiser. 2021. "Peran Modal Sosial Kelompok Nelayan Menghadapi Cuaca Buruk Di Pesisir Pantai Desa Kuranji Dalang." doi: 10.5281/ZENODO.4734345.
- Sytc, Maxim, and Yong Hyun Kim. 2018. "Embeddedness." Pp. 488–90 in *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*, edited by M. Augier and D. J. Teece. London: Palgrave Macmillan UK.
- Turner, Bryan S. 2018. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Ulfa, Mariam. 2018. "Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi)." *Jurnal Pendidikan Geografi* 23(1):41–49. doi: 10.17977/um017v23i12018p041.
- Wibowo, Joni Trio, Rilus A. Kinseng, and Titik Sumarti. 2017. "DINAMIKA MODAL SOSIAL NELAYAN DALAM ARENA EKONOMI: Studi Kasus Nelayan Rajungan Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 11(1):139. doi: 10.14421/jsr.v11i1.1276.
- Woolcock, M., and D. Narayan. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy." *The World Bank Research Observer* 15(2):225–49. doi: 10.1093/wbro/15.2.225.
- Zamzami, Lucky. 2015. "NELAYAN TIKU: TRADISI DAN KELEMBAGAAN SOSIAL BERDASARKAN BUDAYA MASYARAKAT LOKAL BERBASIS KOMUNITAS DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 17(1):39. doi: 10.25077/jantro.v17i1.34